Tafsir surat al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Teoritis dan Praktis)

Zainuddin Al Haj Zaini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

zainuddinzaini20@gmail.com

Abstract

This article explains the management of financing in the study of the interpretation of the Qur'an al-Mujadilah verses 12-13. The education financing management process in improving the quality of schools is carried out through; priority based planning, implementation based on grade based system program, evaluation of internal models and accountability of financial audit models. The results of the analysis refer to primary sources, it can be concluded that Surah Al-Mujadilah verses 12-13 provide lessons that education is not free; In this verse Allah SWT gives conditions to the Muslims who want to ask (learn) the Messenger of Allah to issue alms to the poor. To issue alms in this verse we can assume that the cost of education (learning) must be spent by the seeker of knowledge.

Keywords: *Interpretation, Funding Management, Education.*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan manajemen pembiayaan dalam kajian tafsir Al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 12-13. Proses manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dilaksanakan melalui; perencanaan berbasis prioritas, pelaksanaan berbasis program grade based system, evaluasi model internal dan pertanggung jawaban model audit keuangan. Hasil analisis mengacu pada sumber primer, dapat disimpulkan bahwa Surat Al-Mujadilah ayat 12-13 memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis; Dalam ayat ini Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Kata Kunci : *Tafsir, Manajemen Pembiayaan, Pendidikan.*

Pendahuluan

Problem Pendidikan yang kerap kali di temukan di Indonesia adalah mutu Pendidikan yang rendah di setiap level Pendidikan dan jenis pendidikannya. Data Unesco menunjukkan pada bulan Nopember 2013 terdapat 130 termasuk Indonesia memilik kualitas mutu Pendidikan yang rendah dan Indonesia berada pada urutan ke 62.¹ Peringkat ini menurun yang sebelumnya 58 dan berada dibawah Malaysia. Ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan mencari tenaga kerja. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum 2012-2013 berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN, seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura di urutan ke-7.

Keberhasilan mutu Pendidikan salah satunya ditentukan oleh manajemen pembiayaan yang merupakan komponen yang menjamin terlaksananya kegiatan dan program sesuai standart mutu Pendidikan.² Melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 menetapkan standart pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun ironis dalam realitasnya masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan anggaran pendidikan dengan berbagai macam alasan³

Persoalan krusial ini telah dibuktikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya dari Pusat Balitbang Depniknas yang menyebutkan bahwa besaran biaya satuan Pendidikan keseluruhan di Sekolah Dasar (SD) sebagian sebesar (73,53%) menjadi beban yang cukup memberatkan orang tua. Begitu pula dengan seluruh pembiayaan Pendidikan level di atasnya, yaitu Sekolah Mengengah Pertama (SMP) sebesar (70,00%) menjadi tanggungan orang tua. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen penunjang, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan fisik

¹ Laporan UNISCO pada jurnal intertional Education for word, Nopember 2013. Laporan ini juga dikutip oleh Jalal, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Peningkatan Mutu (Jogyakarta: Karya Nusa, 2011), 7.

² Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam & Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2003), 14.

³Lutfi Hasyim, *Arah Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004,) h,17

sekolah, pengadaan buku pelajaran, dan semacamnya⁴

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan prinsip, proses dan strategi pengelolaan keuangan Pendidikan dalam perspektif kajian tafsir al-qur'an. Kontribusi penelitian ini berupa pengembangan keilmuan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu sekolah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan sekolah.

Pembahasan

Makna Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Proses pengelolaan, pemerolehan dan pendayagunaan sumber daya (uang) secara tertib dan efisien dana sekolah dan dapat dipertanggung jawabkan dinamakan sebagai Manajemen pembiayaan. Menurut Depdiknas⁵ manajemen pembiayaan merupakan tindakan pengelolaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur pembiayaan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan sekolah.

Sementara mutu pendidikan di sekolah adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan yang dijadikan pagu (*benchmark*)."

Dengan demikian, makna manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah langkah-langkah manajerial berupa keluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan sumber daya (uang) secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar terdapat jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan atau sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan juga dimaknai sebagai langkah-langkah yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk meningkatkan kualitas, muatan dan eksistensi

⁴Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (Jakarta, Depdiknas, 2009), 22.

⁵Depdiknas, *Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasman, 2004), 22

pendidikan kearah yang lebih baik agar relevan standar nasional pendidikan dan relevan dengan tuntutan zaman⁶.

Dari sini sangat jelas dikemukakan bahwa faktor utama penentu mutu pendidikan berkaitan erat dengan pembiayaan. Pembahasan masalah-masalah sumberdaya pendidikan, sarana dan prasarana itu tidak lepas dari masalah biaya. Dalam hubungan ini, semakin besar jumlah biaya pendidikan yang dikelola secara efektif dan efisien akan dimungkinkan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain faktor biaya pendidikan adalah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP), disebutkan bahwa mutu pendidikan harus mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional yang dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak saja berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang kompleks dan rumit, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan, karena itu ia menuntut manajemen yang baik. Dengan kata lain untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik, dibutuhkan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah sarana prasarana⁷.

Konsep Keuangan Pendidikan

Konsep pembiayaan menurut Q.S al-Mujadilah; 12-13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Konsep Dasar* (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen SLTP, 2002), 12

⁷Senduk, J.E., *Isu dan Kebijakan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya* (Manado: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, 2006), 11.

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاتِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya 'Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan` (Q.S al-Mujadilah; 12-13)⁸

Tafsir ayat 12-13 dalam surat al-Mujadilah diturunkan berkaitan dengan kebiasaan orang-orang mukmin yang sering bertanya kepada Rasulullah saw berkaitan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam riwayat berikut ini:

- 1) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Thalbah yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa kaum muslimin terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah saw, sehingga membebankan kepada beliau; untuk meringankan beban Rasulullah saw Allah SWT menurunkan ayat (12) dalam surat al-Mujadilah ini yang memerintahkan untuk bersedekah kepada fakir miskin sebelum bertanya kepada Rasulullah saw. Setelah turunnya ayat (12) tersebut kebanyakan orang menahan diri untuk banyak bertanya; maka turunlah ayat (13) sebagai teguran kepada orang-orang yang tidak mau bertanya karena takut mengeluarkan sedekah.
- 2) Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya (yang menganggap hadits ini hasan) yang bersumber dari Ali bahwa setelah turunnya ayat (12) Rasulullah saw bersabda kepada Ali bin bin Abi Thalib, 'Bagaimana pendapatmu kalau sedekah satu dinar?' Ali menjawab, 'mereka tidak akan mampu' Nabi bertanya, 'setengah dinar', Ali menjawab 'mereka tidak akan mampu', Nabi bertanya 'kalau begitu berapa?' Ali menjawab 'satu butir sya'ir', Nabi berkata 'Engkau terlalu sederhana'. Maka turunlah ayat (13) sebagai teguran kepada orang-orang

⁸ Al-Qur'an, *Terjemah Bahasa Indonesia*. Kemenag. 2007

beriman yang bertanya kepada Rasulullah saw tapi takut bersedekah kepada orang miskin. Selanjutnya Ali berkata, 'karena peristiwa inilah umat ini dientengkan dari bebannya.

Pada surat al-Mujadilah ayat 12-13, sangat berkaitan erat dengan biaya pendidikan. Hal ini bisa dijadikan pijakan bagi para pengelola atau stake holder pendidikan dalam mengkonsep berkaitan dengan biaya pendidikan.⁹

Ayat (12) memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis; Dalam ayat ini Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Syarat mengeluarkan sedekah dalam ayat ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mencegah kaum muslimin bertanya secara berlebihan atau terlalu sering bertanya sehingga hal ini membebani Rasulullah saw. Dengan adanya syarat tersebut, maka kaum muslimin berpikir dua kali untuk lebih sering bertanya kepada Rasulullah saw.

Dalam realita dunia pendidikan yang terjadi, biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik juga mempunyai tujuan; walaupun tidak persis sama dengan tujuan yang tertera dalam surat al-Mujadilah ayat 12. Tujuan yang paling utama dari biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik adalah untuk menunjang kelancaran berlangsungnya proses belajar mengajar-sebagaiman telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu, dana pendidikan yang dibebankan kepada para peserta didik bertujuan untuk mengikat para peserta didik agar mereka belajar secara sungguh-sungguh; dengan asumsi bahwa mereka akan merasa rugi kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh setelah mereka mengeluarkan biaya yang harus mereka bayar.

Ayat (13) memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang ingin bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw tapi mereka tidak mampu untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, maka

⁹ Adiwarmar Karim. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : IIIT). Hal 31-33

Allah memberika keringanan berupa penggantian kewajiban dengan mendirikan shalat, atau membayar zakat dan ta`at kepada Allah dan rasul-Nya.

Ayat (13) di atas memberikan gambaran bahwa ketika seorang siswa tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan, maka mereka berhak untuk membayar dengan bentuk yang lain. Bisa berupa bentuk materi ataupun jasa yang lain; Ambil contoh: membayar dengan hasil pertanian, hasil ladang, ataupun berupa jasa.

Konsep yang diajarkan dalam surat al-Mujadilah ayat (12-13) ini telah diterapkan oleh lembaga pendidikan Pesantren Tradisional, para santri yang menuntut ilmu kepada kyainya tidak dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang; tapi mereka ada yang membawa hasil pertanian-berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan- seperti ketela, pisang ataupun yang lainnya; atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar.

Selanjutnya, di pesantren tradisional pun tidak mempersalahkan santri yang tidak mampu membayar berupa materi ataupun barang; tapi mereka diberdayakan oleh para kyai untuk membantu mengurus kekayaan kyai, seperti memelihara kolam, mencangkul di sawah, ataupun bekerja di kebun atau lading. Hal ini menunjukkan bagaimana para kyai yang mengajar di pesantren tradisional menerapkan prinsip pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13.

Dasar dari hal ini adalah hadits berikut¹⁰:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah*

¹⁰ <http://irwanburhanudingmail.blogspot.com/2012/11/konsep-biaya-pendidikan-dalam.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2013

tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap kepemimpinannya.¹¹

La tanalul ilma illa bisittatin, saumbika an majmu bibayani: dzakaun, wa khirsun, wastikbarun, wabulghotun, wairsyadu ustadzin, wa tuulu zamnin”

Artinya : tidak akan diperoleh sebuah ilmu kecuali dengan enam perkara: Kecerdasan, semangat, sabar dan pakai ongkos (biaya) Petunjuk (bimbingan) guru dan dalam tempo waktu yang lama.

Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Markus Basuki¹² menyebutkan proses manajemen pembiayaan pendidikan dilakukan dengan pengambilan keputusan secara konsesus, yang didalamnya terdapat jaminan rasa aman serta diperkuat oleh peran dan posisi yang profesional sehingga mencapai tujuan efektif.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah¹³.

Adapun pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item, yaitu: pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan

¹¹ al-Naisyaburi, Muslim, *Shahih Muslim, juz 9, Mauqi'u al-Islam*: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005.

¹²Markus Basuki, *Pembiayaan Pendidikan Sekolah Swasta* (Jakarta: Dahlia Pustaka, 2011), 26.

¹³ Triaswati, *Education Finance in Cambodia: Issues and Model, unpublished report for UNICEF Office at Cambodia*, (2005), 22.

prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif dan pendataan

Proses manajemen pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika performance sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarnya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan¹⁴.

Menurut Levin sebagaimana dikutip Nanang Fatah¹⁵, bahwa pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/ dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Dalam menghitung biaya pendidikan ini, faktor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada didalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dapat dihitung menggunakan teknik (*cost analysis*):

¹⁴David Clark, *Financing of Education in Indonesia: Final Report Submitted to ADB for collaboration with Bappenas* (Jakarta: Bappenas, 2007), 44.

¹⁵Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 89.

productivity measurement atau analisa *cost-effectiveness* dan atau menggunakan analisa *cost-benefit*¹⁶.

Sistem biaya pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem biaya pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem¹⁷

Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah mencakup empat kegiatan pokok, yaitu;

Pertama; perencanaan yang menerapkan pendekatan penganggaran terpadu berbasis prioritas, perencanaan disini adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kedua; pelaksanaan, yakni proses mewujudkan langkah-langkah program sesuai rencana.

Ketiga; valuasi, yakni proses mengukur dan menilai tingkat kesesuaian dan efektivitas rencana dengan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan.

Keempat; pertanggung jawaban yakni proses pembiayaan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat) sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan

Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang pelaksanaannya diterapkan melalui program *grade based system* dengan evaluasi

¹⁶Triaswati, *Financing Gap on Poverty Alleviation Programs in Indonesia: Measurement and Implementation, unpublished report for CIDA- Governance Reform Support II Project for bapenas Indonesia*, (2006), 95.

¹⁷ Depag, Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama dan Keagamaan. *Standarisai Biaya Pendidikan di Madrasah (MI, MTs, MA)*, (Jakarta: Depag, 2002), 39.

model internal. Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah dipahami sebagai cara mengatur lalu lintas keuangan yang diterima dan di belanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah meliputi:

- 1) Perencanaan anggaran,
- 2) Strategi mencari sumber dana sekolah,
- 3) Penggunaan keuangan sekolah,
- 4) Pengawasan dan evaluasi anggaran, dan
- 5) Pertanggung jawaban dengan menerapkan model audit keuangan dan kinerja pengelolaan biaya pendidikan.

Strategi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Terdapat beberapa strategi dalam manajemen pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Sebagaimana disinggung sebelumnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah adalah serentetan proses dalam sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Proses tersebut diawali dari mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Strategi pemenuhan standar nasional pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatan Sekolah empat tahunan) dan/atau RKAS. Minimal berisi komponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan komponen yang akan diusulkan pemenuhannya oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah.
- 2) Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).

Pelaksanaan strategi ini secara berkesinambungan harus dipantau dengan cara; pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam

pemenuhan standar dan melakukan penilain internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Bagian akhir dari strategi ini adalah pelaporan, dengan cara;

Pertama; Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.

Kedua; Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.

Ketiga; Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.

Dalam kegiatan umum pembiayaan pendidikan di sekolah, terdapat tiga strategi yang biasa dikembangkan, yakni: *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan), dan *auditing* (pemeriksaan).¹⁸

1) *Budgeting* (penyusunan anggaran)

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

2) *Accounting* (pembukuan)

Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini

¹⁸ Ali Imron, *Manajemen Pembiayaan Sekolah* (Jakarta, Gramedia, 1995), 22.

tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara disertai tugas menerima, menyimpan dan membayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3) *Auditing* (Pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing.

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah meliputi:

- 1) *Strategic Planning*, yakni strategi yang berpedoman pada keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, economic dan financial.
- 2) *Strategic Management*, yakni strategi yang berupaya mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
- 3) *Strategic Thinking*, yakni strategi yang digunakan sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan, yang kesemuanya diawali penyusunan anggaran (*budgeting*) melalui RKAS.

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah dilakukan melalui perumusan strategi, implementasi strategi, serta, pengendalian dan evaluasi strategi yang terdiri dari: Perencanaan biaya pendidikan, penggunaan biaya pendidikan, dan pengendalian biaya pendidikan. Serta diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan sekolah berlandaskan azas efisiensi, akurasi, pelayanan prima dan berkeadilan sosial, sedangkan pembukuannya (*accounting*) dilakukan bendahara yayasan sekolah.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan;

1. Surat Al-Mujadilah ayat 12-13 memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis; Dalam ayat ini Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.
2. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah yang dikembangkan berdasarkan : (a) nilai ibadah/religius, (b) biaya pendidikan ditanggung bersama, (c) kualitas pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing, (d) dapat memenuhi standart mutu pendidikan nasional/internasional, (e) pengelolaan biaya pendidikan dijalankan dengan amanah dan jujur. Prinsip yang dipergunakan adalah : amanah, jujur, gotong royong, tepat sasaran, efektif, adil, berbasis prioritas dan berkesinambungan.
3. Proses manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dilakukan melalui : (a) perencanaan penganggaran terpadu berbasis prioritas, (b) menerapkan program *grade based system*, (c) evaluasi menerapkan model internal, (d) pertanggung jawaban menerapkan model audit keuangan dan kinerja pengelolaan biaya pendidikan. (3) Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dilakukan dengan : (a) Penyusunan anggaran (*budgeting*) RKAS. (b) Pembukuan (*accounting*) dilakukan bendahara yayasan sekolah. (c) Pemeriksaan (*auditing*) dilakukan pimpinan yayasan dan stakeholder secara objektif dan berkelanjutan. Sedangkan temuan formal penelitian ini adalah "Model penganggaran terpadu berbasis *priority quality*".

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : IIT).
- al-Naisyaburi, Muslim, *Shahih Muslim, juz 9, Mauqi'u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah*, 2005.
- Basuki, Markus. *Pembiayaan Pendidikan Sekolah Swasta* (Jakarta: Dahlia Pustaka, 2011).
- Clark, David. *Financing of Education in Indonesia: Final Report Submitted to ADB for collaboration with Bappenas* (Jakarta: Bappenas, 2007).
- Depag, Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama dan Keagamaan. *Standarisai Biaya Pendidikan di Madrasah (MI, MTs, MA)*, (Jakarta: Depag, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Konsep Dasar* (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen SLTP, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasman, 2004).
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Hasyim, Lutfi. *Arah Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004).
- <http://irwanburhanundingmail.blogspot.com/2012/11/konsep-biaya-pendidikan-dalam.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
- Imron, Ali. *Manajemen Pembiayaan Sekolah* (Jakarta, Gramedia, 1995).
- Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta; Publishraya. 2007).
- Laporan UNISCO pada jurnal intertional Education for word, Nopember 2013. Laporan ini juga dikutip oleh Jalal, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Peningkatan Mutu (Jogyakarta: Karya Nusa, 2011).
- Mulyasa. *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam & Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2003).

Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (Jakarta, Depdiknas, 2009).

Senduk, J.E., *Isu dan Kebijakan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya* (Manado: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, 2006).

Triaswati, *Education Finance in Cambodia: Issues and Model, unpublished report for UNICEF Office at Cambodia, (2005).*

Triaswati. *Financing Gap on Poverty Alleviation Programs in Indonesia: Measurement and Implementation, unpublished report for CIDA- Governance Reform Support II Project for bapenas Indonesia, (2006).*